

## Iwan Fals Ingin Saksikan Jokowi Berdebat dengan Rocky Gerung

JAKARTA (IM) - Musisi legendaris, Iwan Fals, ingin menyaksikan Presiden Jokowi berdebat atau berdiskusi dengan pengamat politik, Rocky Gerung yang dikenal kerap mengkritik jalannya pemerintahan Jokowi.

Menurut Iwan, debat antara Jokowi dan Rocky akan ada manfaat yang bisa diambil. Bahkan, bisa menjadi hiburan yang sehat di masa pandemi saat ini.

"Klo Presiden ada waktu rasanya ingin juga sih menyaksikan Jokowi dan Rocky Gerung berjumpa utk debat atau berdiskusi, karena Bung Rocky kan sering ngritik

Presiden Jokowi, kali aja ada manfaat yg bisa diambil, mungkin ini jadi hiburan yg sehat dimasa pandemi seperti ini, oke gak?," tulis Iwan Fals dalam akun Twitter-nya @iwanfals yang dikutip Kamis (25/2).

Lebih dari 50 orang mengomentari cuitan pelantun lagu Bento itu. Mayoritas mendukung adanya debat antara Rocky dan Jokowi.

"Setuju sekali!" balas @encebagus.

"Okeh ig, tp kira2 Jokowi berani gak yah," sambung @DPriokk.

"Kalau untuk kebaikan bangsa, kenapa tidak???" cuit @dimasKramadhan. ● han

## Khofifah akan Lantik Gus Ipul sebagai Wali Kota Pasuruan

SURABAYA (IM) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dijadwalkan melantik 17 kepala daerah terpilih pada Jumat (26/2) ini. Salah satu di antara kepala daerah yang akan dilantik Saifulallah Yusuf atau Gus Ipul, saingan Khofifah saat pemilihan gubernur Jatim pada Timor 2018.

Gus Ipul terpilih sebagai wali kota Pasuruan. Gus Ipul bersama 16 kepala daerah terpilih lainnya akan dilantik di Gedung Negara Graha, Surabaya.

"Ada 17 kepala daerah yang dilantik Jumat besok dari pemenang Pilkada Serentak 2020 di Jatim, termasuk Kota Pasuruan," kata Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Jatim Jempin Marbun saat dikonfirmasi, Kamis (25/2).

Selain Kota Pasuruan, pelantikan itu juga dihadiri kepala daerah dari Ponorogo, Trenggalek, Kediri, Ngawi, Lamongan, Gresik, dan Mojokerto.

Lalu, Malang, Blitar, Sumenep, Situbondo, Banyuwangi, Jember, Kota Blitar, Sidoarjo, dan Kota Surabaya.

Pada dua tahun lalu, Khofifah dan Gus Ipul bertarung di Pilkada Jawa Timur. Gus Ipul yang merupakan petahana menggandeng politik PDI-P Puti Guntur Soekarno sebagai calon wakil gubernur.

Sementara, Khofifah menggandeng Emil Elisiantio Dardak. Namun, Gus Ipul yang sudah dua periode menjabat sebagai wakil gubernur mendampingi Soekarno kalah di Pilkada Jatim 2018.

Pilkada Jatim 2018 merupakan yang ketiga kalinya diikuti Khofifah. Pada dua pilkada sebelumnya, Khofifah kalah dengan pasangan Soekarno-Gus Ipul.

Pada Pilkada Serentak 2020, Gus Ipul memilih maju sebagai calon wali kota Pasuruan. Ia menggandeng politik Golkar Adi Wibowo. Pasangan ini melawan pasangan petahana Raharto Teno Prasetyo-M Hasjim Asjari.

Gus Ipul menang telak dengan meraih 73.236 suara (67,9 persen). Sementara petahana kalah dengan perolehan 34.572 suara (32,1 persen). ● mei

# 2 Polhukam

IDN/ANTARA



## MENAKER RESMIKAN FASILITAS BLK BERBASIS KOMPETENSI

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah (tengah) didampingi Dirjen Pembinaan Pelatihan Kerja Budi Hartawan (kanan) dan Kadis Naker Povinsi Banten Alhamidi (kiri) menandatangani prasasti peresmian gedung Latihan Kerja Berbasis Kompetensi di Serang, Banten, Kamis (25/2). Menaker juga membuka pelatihan pertama pasca pandemi yang diikuti 386 peserta untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja sesuai tuntutan pasar dan peluang kerja yang tersedia.

# Kader Muda Demokrat Minta AHY Mundur dari Kursi Ketua Umum

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menegaskan siap menghadapi gerakan pengambilalihan Partai Demokrat dari luar.

JAKARTA (IM) - Ketua Umum DPP Kader Muda Demokrat Aswin Ali Nasution mendukung Kongres Luas Biasa (KLB) Partai Demokrat segera digelar. Dia menilai saat ini Partai Demokrat sedang berada dalam fase krisis kepemimpinan.

Aswin menjelaskan, apa yang dilakukannya semata-mata mencintai Partai Demokrat dan berharap partai yang memiliki corak biru itu lebih maju dan modern.

"Kita menginginkan partai ini ke depannya lebih baik, lebih modern dan maju. Maka kita berharap, kalau ada krisis

kepemimpinan, atau ada krisis kepercayaan di internal partai, maka solusinya gampang, sesuai AD-ART, yakni adalah kongres luar biasa," kata Aswin saat konferensi pers di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (25/2).

Aswin mengharapkan seorang pemimpin yang lebih egaliter dan lebih humanis. Kemudian, pemimpin harus mampu menyatukan semua faksi yang ada di dalam internal partai.

"Meminta dengan hormat, dengan santun, kepada Ketua Umum AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) untuk mundur

lah sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat," ucapnya.

Dia menjelaskan, salah satu nama yang diusulkan menjadi ketua umum dalam KLB nanti merujuk pada nama Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Aswin pun mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Moeldoko terkait usulan tersebut. "Kita juga meminta kepada beberapa tokoh yang memang layak untuk memimpin Partai Demokrat menghadapi Pemilu 2024, salah satu yang kita minta adalah Jenderal Purnawirawan Moeldoko. Itu yang telah kita sampaikan langsung kepada dia," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan komitmen untuk tetap menjadi bagian dari partai yang pernah didirikannya. Dia juga siap menghadapi gerakan pengambilalihan Partai Demokrat dari luar.

Pernyataan itu disampaikan SBY melalui rekaman video yang disiarkan di akun YouTube, Rabu (24/2) merespons polemik gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat. "Saya akan tetap menjadi kader Partai Demokrat dan akan menjadi benteng dan bhayangkara partai ini menghadapi siapapun yang akan menggangu merusak dan menghancurkan partai kita," ujar SBY.

Menurut SBY, yang disasar oleh mereka bukan lagi para Ketua DPD ataupun Ketua DPC, tetapi siapa pun yang mau diiming-iming sejumlah imbalan dan janji-janji yang menggiurkan. Jadi, sangat mungkin para pelaku gerakan itu menghasut dan mengadu domba antara pimpinan DPP Partai Demokrat dengan para Ketua DPD dan Ketua DPC.

"Dengan memainkan isu bahwa dalam Musda dan Muscab mendatang mereka akan

diganti, sesuatu yang tidak benar adanya," tegasnya.

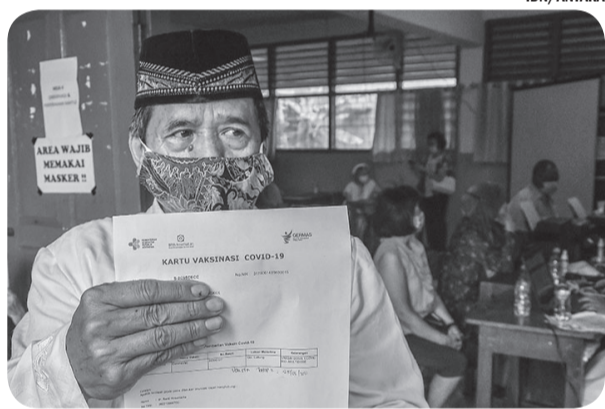
Kemudian, sambung Presiden RI ke-6 ini, sejumlah fitnah dan isu juga terus dihembuskan di daerah-daerah yang semuanya tidak benar, dan pada saatnya akan dapat dijelaskan secara gamblang dan akuntabel.

Saat berbagai lembaga survei memotret elektabilitas Partai Demokrat yang terus meningkat saat ini, kata SBY, para pelaku gerakan mengatakan bahwa Demokrat dalam keadaan hancur lebur. Tapi, mana ada orang yang mau mengambali alih Partai Demokrat jika memang kondisi partai benar-benar hancur lebur.

Tentu para kader di seluruh Tanah Air mesti sadar dan mengerti, justru gerakan dan perilaku segelintir orang inilah yang bisa merusak dan menghancurkan partai.

"Jangan mau kita diperdaya, dan ditipu oleh akal busuk mereka," seru SBY. ● han

IDN/ANTARA



## TARGET VAKSINASI UNTUK LANSIA

Warga lansia (lanjut usia) menunjukkan kartu vaksinasi di SD 05, Penggilingan, Jakarta Timur, Kamis (25/2). Pemerintah menargetkan 21,5 juta lansia akan mendapat vaksin COVID-19 guna mengurangi penyebaran wabah COVID-19.

## Uang Suap Ekspor Benur Lobster Diduga Mengalir ke Sejumlah Aset Edhy Prabowo

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga uang suap proses perizinan ekspor benur bening (benur) lobster mengalir ke sejumlah aset mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo dan Sekretaris Pribadi Edhy, Andreau Misanta Pribadi.

Salah satu saksi yang didalami terkait dugaan aliran uang suap itu yakni, seorang Notaris, Selasih. Selasih diperiksa sebagai saksi pada Rabu, 24 Februari 2021, kemarin.

Penyidik mendalami keterangan saksi Selasih ihwal tanah yang dibeli oleh Andreau Misanta Pribadi. Diduga, Andreau membeli tanah dengan menggunakan kumpulan uang dari para eksportir benur lobster.

"Selasih (Notaris), didalami keterangannya terkait dugaan pembelian tanah oleh tersangka APM (Andreau Pribadi Misanta) melalui istrinya yang diduga bersumber dari kumpulan uang para eksportir yang mendapatkan izin ekspor benur di KKP tahun 2020," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (25/2).

Tak hanya itu, penyidik juga mendalami keterangan dari saksi Noer Syamsi Zakaria terkait adanya pembelian material untuk pembangunan rumah Edhy Prabowo. Uang untuk pembangunan rumah Edhy Prabowo itu diduga dari

para eksportir benur lobster.

"Noer Syamsi Zakaria (karyawan swasta), didalam pengetahuannya terkait dengan dugaan pembelian material untuk pembangunan rumah tersangka EP yang diduga bersumber dari kumpulan uang para eksportir yang mendapatkan izin ekspor benur di KKP tahun 2020," jelas Ali.

Penyidik juga telah mengantongi kesaksian dari Sekretaris Pribadi Andreau, Esti Marina, pada pemeriksaan kemarin. Dari kesaksian Esti, penyidik mendalami terkait kepemilikan sejumlah uang dari Andreau.

"Pung Nugroho (swasta) didalam pengetahuannya terkait dengan dugaan pembelian jam tangan mewah oleh Istri tersangka EP di Amerika Serikat," pungkasnya.

Sekadar informasi, KPK telah menetapkan tujuh tersangka kasus dugaan suap terkait perizinan ekspor benur lobster. Ketujuh tersangka itu yakni, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo (EP); Stafus Menteri Kelautan dan Perikanan, Safri (SAF) dan Andreau Misanta Pribadi (AMP).

Kemudian, Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK), Siswadi (SWD); Staf Istri Menteri Kelautan dan Perikanan, Ainul Faqih (AF); dan pihak swasta Amirul Mukminin (AM). Sementara satu tersangka pemberi suap yakni, Direktur PT DPP, Suharjo (SJT). ● han

## Perludem: 3 Faktor Fundamental Mengapa UU Pemilu Perlu Direvisi

JAKARTA (IM) - Keinginan sejumlah lembaga pemantau pemilu dan partai politik untuk merevisi Undang-undang nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) masih menemui jalan buntu. Sikap sejumlah fraksi di DPR masih berbeda-beda, ditambah sikap pemerintah yang 'enggan' merevisi UU tersebut.

Penelitian Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Nurul Amalia Salabi mengatakan, pihaknya akan tetap mendorong agar UU tersebut direvisi. Menurutnya, setidaknya ada tiga faktor fundamental kenapa UU itu perlu direvisi.

Pertama, pelaksanaan pemilu serentak 5 kotak tahun 2019 harus menjadi pembelajaran bersama karena terbukti membebani Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).

"Jadi, mesti ada desain baru untuk keserentakkan pemilu, mengacu pada Putusan MK No.55/2019," ujar Nurul saat dihubungi, Kamis (25/2).

Faktor kedua, kata Nurul, sehubungan dengan pandemi Covid-19 yang belum bisa diprediksi kapan berakhirnya.

Untuk itu, revisi UU Pemilu diharapkan memberi gambaran teknis pelaksanaan pemilu. Contohnya, menambah variasi metode pemungutan suara, seperti memberlakukan early voting dan pemilihan dengan pos.

Ketiga, perlu ada penguatan tentang batas-batas wewenang Bawaslu, DKPP, dan PTUN dalam skema penegakan hukum pemilu.

"Tujuannya, agar tidak ada lembaga yang mengestensifikasi kewenangannya sesuai tafsir masing-masing lembaga," kata ujar Nurul.

Sebagai informasi, sebelumnya seluruh partai pendukung pemerintah di DPR kompak menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Otomatis yang tersisa yang menghendaki revisi hanya dua fraksi, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Salah satu isu penting dalam revisi UU Pemilu adalah normalisasi Pilkada pada 2022 dan 2023. Beberapa partai koalisi sebelumnya menghendaki revisi beleid itu. Namun belakangan, sikapnya berubah dan memutuskan tidak ingin melanjutkan

pembahasannya.

Beredar kabar penolakan parpol koalisi terhadap revisi UU Pemilu terjadi atas permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun isu tersebut dibantah Juru Bicara Presiden, Fadjoel Rachman.

"Perdebatan tersebut ada di DPR, pemerintah tidak terlibat. Pemerintah fokus menangani pandemi Covid-19, memulihkan ekonomi rakyat," ujar Fadjoel saat dihubungi MNC Portal, Kamis 11 Februari 2021 malam.

Dihubungi terpisah, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UA) Ujang Komarudin menduga kompaknya sikap parpol koalisi menolak revisi UU Pemilu karena ada instruksi Jokowi.

"Bisa saja itu instruksi presiden. Saja Jokowi kumpulkan partai-partai koalisi. Akhirnya revisi tak jadi. Biasanya di koalisi pemerintahan yang didengar itu Jokowi. Karena jabatannya Presiden dan sebagai komandan koalisi. Ketika ada perintah, partai-partai pasti akan diam. Tak akan berani ada yang menolak," jelasnya. ● han



## KAMPANYE #2021STOPMAKANPLASTIK

Aktivis lingkungan memunguti sampah plastik saat kampanye #2021stopmakanplastik di pesisir Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (25/2). Aksi yang dilakukan oleh Ecoton, Komunitas Tolak Plastik dan sejumlah mahasiswa tersebut dilakukan untuk mengajak masyarakat tidak membuang sampah plastik sembarangan serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.

## KPK Sedang Mengusut Dugaan Korupsi Pengaturan Cukai di Pelabuhan Bintang

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang mengusut dugaan korupsi terkait pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintang tahun 2016 sampai 2018.

"Bahwa benar, KPK saat ini sedang melakukan penyidikan dugaan TPK terkait pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintang Wilayah Kabupaten Bintang Tahun 2016 sampai 2018," kata Plt. Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkat kepada wartawan, Kamis (25/2).

KPK telah menetapkan tersangka dalam proses penyidikan dugaan korupsi terkait pengaturan barang kena cukai ini. Sayangnya, Ali masih eng-

gan membeberkan secara detail ihwal tersangka serta konstruksi perkara ini. "Kami belum dapat menyampaikan detail kasus dan tersangkanya karena sebagaimana telah kami sampaikan bahwa kebijakan Pimpinan KPK terkait ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penahanan atau penahanan telah dilakukan terhadap para tersangka," beber Ali.

Ali berjanji, pada waktunya, KPK pasti akan mengumumkan kepada publik terkait konstruksi perkara, alat bukti, hingga tersangka dalam kasus ini. Termasuk, pasal sangkanya untuk para tersangka.

"Kami memastikan, sebagai bentuk transparansi kepada publik, KPK akan menginformasikan setiap perkembangan penanganan perkara ini," tandasnya. ● mei

## Salatiga Ditetapkan sebagai Kota Paling Toleran 2020

SALATIGA (IM) - Kota Salatiga, Jawa Tengah, dinobatkan sebagai kota paling toleran di Indonesia tahun 2020 versi Setara Institute. Kota Salatiga yang mendapat poin 6.717 mengalahkan Singkawang, Manado, Tomohon, Kupang, Surabaya, Ambon, Kediri, Sukabumi, dan Bekasi.

Wali Kota Salatiga Yuliyanto mengatakan penyerahan penghargaan tersebut diserahkan di Jakarta pada Kamis (25/2) dan diterima Wakil Wali Kota Salatiga Muh Haris. "Alhamdulillah, hari ini kita mendapat predikat sebagai Kota Tertoleran, ini membanggakan tapi juga menjadi tantangan untuk dipertahankan," paparnya.

Yuliyanto mengungkapkan faktor pendukung keberhasilan Salatiga mendapat predikat sebagai Kota Paling Toleran adalah

tidak adanya diskriminasi dalam pembuatan kebijakan. "Semua Forkompida, masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat saling sinergi. Semua satu tujuan demi toleransi," jelasnya.

Selain itu, Yuliyanto juga menyoroiti keberhasilan di bidang ekonomi.

"Pembangunan ekonomi dan manusia yang berhasil sangat menunjang toleransi. Umpamanya masyarakat tidak sejahtera, tentu akan memengaruhi toleransi," jelasnya.

Menurut Yuliyanto, karena kesadaran dan pendidikan masyarakat yang cukup tinggi, maka masyarakat tidak mudah terpengaruh isu yang memecah belah persatuan. "Sebagai City of Harmony, kita harus saling menjaga, baik dari internal Salatiga maupun luar daerah," kata Yuliyanto. ● mei

### PENGUMUMAN

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini kami mengumumkan bahwa Kitabelli Pte. Ltd. Bermaksud untuk melakukan pengambilalihan atas saham pada PT Juuli Teknologi Indonesia (Perseroan) yang akan menyebabkan berahlinya pengendalian pada Perseroan.

Pihak yang berkepentingan dapat mengirimkan surat kepada Perusahaan di alamat berikut selambat-lambatnya 14 hari sejak pengumuman ini:

Jl. Gunung Sahari No. 2 D, RT.001/RW.003 Gunung Sahari Utara, Sawah Besar Central Jakarta 10720, Indonesia  
Jakarta, 26 February 2021  
Jajaran Direksi/ Board of Directors  
PT Juuli Teknologi Indonesia  
Kitabelli Pte. Ltd.

### ANNOUNCEMENT

To fulfil the requirements of Article 127 Paragraphs (2) and (8) of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies, we hereby announce that Kitabelli Pte. Ltd. intends to acquire the shares in PT Juuli Teknologi Indonesia (the Company) which would result in a change of control in the Company.

Interested parties may submit a letter to the Company at the following address no later than 14 days of this announcement:

Jl. Gunung Sahari No. 2 D, RT.001/RW.003 Gunung Sahari Utara, Sawah Besar Central Jakarta 10720, Indonesia  
Jakarta, 26 February 2021  
Jajaran Direksi/ Board of Directors  
PT Juuli Teknologi Indonesia  
Kitabelli Pte. Ltd.